

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

UUD nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Hanel (2005:38) menyatakan bahwa koperasi adalah organisasi otonom yang berada dalam lingkungan sosial ekonomi, yang memungkinkan setiap individu dan setiap kelompok orang untuk merumuskan tujuan-tujuannya secara otonom dan mewujudkan tujuan-tujuan itu melalui aktivitas ekonomi yang dilaksanakan secara bersama-sama. Jadi koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan dan bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.

2. Jenis-Jenis Koperasi

Dalam UUD nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian jenis koperasi dibedakan menjadi lima yaitu:

1. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dibidang simpanan dan pinjaman sebagai salah satu usaha yang melayani anggotanya. Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang bergerak dalam penghimpunan simpanan

dari anggota kemudian meminjamkannya kembali kepada anggota yang membutuhkan. Dalam koperasi ini anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik (*owner*) dan nasabah (*customers*). Status keanggotaannya adalah pemilik dan nasabah. Contohnya, koperasi simpan pinjam unit desa, koperasi serba usaha, dan koperasi kredit. Jenis koperasi ini juga biasanya ada di beberapa perusahaan. Perusahaan akan memotong sebagian kecil gaji pegawai dan menyimpannya dalam bentuk bisnis tersebut. Dana tersebut akan diputar untuk pegawai lain yang butuh pinjaman. Jika seorang pegawai keluar atau mengundurkan diri, dana simpanan yang ia miliki akan dikembalikan.

2. Koperasi Konsumen adalah koperasi yang beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli menjual barang konsumsi
3. Koperasi Produsen adalah koperasi yang beranggotakan para pengusaha kecil dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.
4. Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasi atau anggotanya.
5. Koperasi Jasa adalah koperasi yang bergerak dibidang usaha jasa lainnya dan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota.

Jenis Koperasi menurut aneka ragamnya unit usahanya yang dikutip oleh Hasmawati 2013 dalam buku Manajemen koperasi adalah :

1. Koperasi Usaha tunggal (*Single purpose*)

Koperasi dengan usaha tunggal (*single purpose*) memberikan pelayanan atau usaha dengan hanya satu jenis usaha atau satu bidang kegiatan saja. Adapun usahanya dapat bekerja berupa :

- Menyimpan uang dan memberi pinjaman(kredit) disebut sebagai koperasi kredit

- Menjual barang-barang konsumsi, disebut sebagai koperasi konsumsi
- Atau koperasi yang memasarkan hasil produksi para anggotanya

Bila seseorang ingin memperoleh kredit, membeli barang-barang konsumsi dan memasarkan hasil produksinya, maka ia harus menjadi anggota koperasi tersebut. Jika lokasi koperasi tersebut berjauhan, maka sudah dapat dipastikan akan menuntut pengeluaran dana yang cukup besar untuk transportasi

2. Koperasi Usaha majemuk (Multi purpose)

Dibutuhkan satu koperasi yang dalam usahanya dapat menyediakan pelayanan yang dibutuhkan oleh anggota dan masyarakat. Dengan kata lain koperasi tersebut harus koperasi serba usaha atau multi purpose. Koperasi ini mempunyai fungsi yang terintegrasi. Contohnya adanya pelayanan kredit, konsumsi dan pemasaran dari para anggotanya dapat dilaksanakan dalam satu manajemen usaha

Dengan demikian dalam menentukan jenis koperasi yang hendak didirikan hendaknya berdasarkan pada sikap, kebutuhan dan kehendak serta pandangan para calon anggotanya.

3. Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi yang digunakan oleh semua koperasi yang ada di Indonesia.

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka pengertian dari bersifat sukarela adalah seseorang harus sukarela menjadi anggota koperasi (tidak ada paksaan). Bahkan tidak hanya untuk menjadi anggota saja, untuk keluar dari keanggotaan koperasi juga harus sukarela berdasarkan keinginan sendiri. Sementara maksud dari bersifat terbuka adalah tidak ada diskriminasi antar anggota koperasi. Semua anggota koperasi harus diperlakukan sama.
2. Pengelolaan secara demokratis disini koperasi dalam pengelolaannya harus dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Disini, anggota koperasi memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota pengertian dari prinsip ini adalah untuk mewujudkan nilai kekeluargaan dan keadilan, maka pembagian sisa hasil usaha kepada anggota berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota koperasi, tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi. Jadi, pembagian sisa hasil usaha (SHU) tidak hanya berdasarkan modal melainkan juga berdasarkan jasa usaha setiap anggota koperasi.

4. Pemberian balas jasa terbatas pada modal Modal dalam suatu koperasi dipergunakan untuk kemanfaatan anggota, bukan sekedar mencari keuntungan. Balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan pada besarnya modal yang diberikan. Adapun yang dimaksud secara terbatas yaitu wajar (tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar).

5. Kemandirian, Mandiri artinya suatu koperasi harus berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang didasarkan atas kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

2.1.2 Konsep Pengendalian Internal menurut COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission).

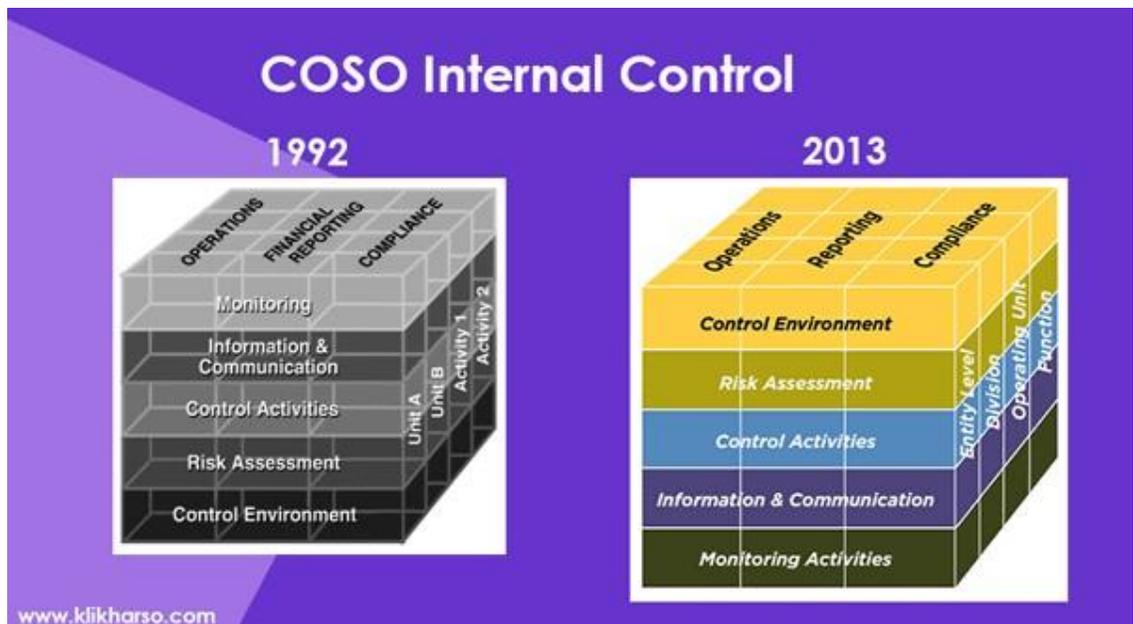
Suatu komite yang diorganisir oleh lima organisasi profesi yaitu IIA (*Institute of Internal Auditor*), AICPA (*American Institut of Certified Public Accountant*), IMA (*The Institute Management Accountant*), FEI (*Financial Executive Institute*), dan AAA (*American Accounting Association*) pada bulan Oktober 1987 menghasilkan kajian yang dinamakan *COSO framework of internal control*. COSO mengeluarkan definisi tentang pengendalian intern pada tahun 1992. Kerangka konsep pengendalian yang diterbitkan oleh COSO dikenal umum sebagai COSO Internal Control Integrated Framework. Nama ini tetap digunakan pada kerangka konsep yang baru yang diterbitkan pada tahun 2013

menggantikan kerangka konsep yang lebih awal diterbitkan pada tahun 1992.

COSO IC pada Tahun 2013 terdiri dari tiga volume sebagai berikut:

- a) *Executive Summary* : yaitu menggambarkan secara umum kerangka pengendalian internal terhadap para dewan pengawas (*board of directors*), CEO, dan para manajemen senior lainnya.
- b) *Framework and Appendices* : yaitu menentukan rangka, menguraikan pengendalian intern, menjelaskan syarat pengendalian intern yang efektif serta komponen dan prinsip-prinsipnya, dan memberikan arahan bagi semua tingkatan manajemen dalam merancang, melaksanakan, dan mengarahkan pengendalian intern serta menilai efektivitasnya.
- c) *Illustrative Tools*: menyediakan contoh dan skenario yang bisa digunakan untuk menilai efektivitas sistem pengendalian intern.

Gambar 2.1 Framework COSO IC 1992 dan 20



Gambaran konsep pengendalian intern COSO yang sangat terkenal adalah berbentuk kubus. Lihat ilustrasi pada gambar 2.1. Gambar kubus sebelah kiri diambil dari COSO IC 1992. Gambar tersebut menunjukkan keterikatan yang erat satu sama lain antara tujuan, komponen, dan struktur organisasi tempat diterapkannya pengendalian intern. Dari dimensi sisi kubus atas merefleksikan tujuan, sisi depan merefleksikan komponen, dan di sisi samping merefleksikan ruang lingkup penerapan pengendalian intern. Konsep ini masih tetap digunakan pada COSO IC 2013 dengan menyesuaikan nama istilah di setiap sisi sesuai dengan konsep kerangka yang baru.

a. Definisi dan Tujuan

Berbeda dengan COSO ERM (*Enterprise Risk Management*) yang melakukan perubahan definisi, COSO IC 2013 secara prinsipnya masih mempertahankan definisi pengendalian intern tahun 1992. Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses di dalam organisasi (entitas) yang dipengaruhi oleh dewan pengawas (*board*), manajemen, dan personel lainnya, disusun untuk memberikan kepercayaan penuh bagi pencapaian tujuan organisasi. Pada sisi tujuan inilah terjadi sedikit perubahan. Tujuan yang ingin dicapai organisasi menurut COSO IC 2013 terdiri dari tiga kategori yaitu, tujuan terkait operasi (*operations*), pelaporan (*reporting*), dan kepatuhan (*compliance*). Tujuan yang mengalami perubahan atau perluasan cakupan dari COSO IC 1992 adalah tujuan operasi dan pelaporan. Tujuan operasi tidak hanya tentang efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya tetapi juga melingkupi.

Keseluruhan efisiensi dan efektivitas operasi termasuk tujuan kinerja operasi dan keuanganserta pengamanan aset dari kerugian. Tujuan dari perluasan cakupan pelaporan meliputi semua pelaporan organisasi dan tidak dibatasi hanya pada lingkup pelaporan keuangan saja seperti kerangka 1992. Adapun tujuan kepatuhan masih sama dengan konsep COSO IC 1992. Kutipan definisi pengendalian intern asli dari COSO IC 2013 adalah sebagai berikut:

“internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance.”

b. Komponen

COSO IC 2013 tidak mengubah lima komponen pengendalian intern yang telah dipakai sejak COSO IC 1992, tetapi dengan penjelasannya yang mengalami penyempurnaan.

1) Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) Lingkungan pengendalian adalah hubungan standar, proses dan struktur yang menjadi pondasi dalam pengelolaan pengendalian intern diseluruh organisasi. Dewan pengawas dan top management menciptakan ritme pada level tertinggi organisasi akan pentingnya sebuah pengendalian intern dan standar perilaku yang diharapkan. Sub-komponen lingkungan pengendalian meliputi kredibilitas dan nilai etika yang dianut organisasi, kriteria yang menjadikan dewan pengawas mampu melaksanakan tanggung jawab tata kelola, struktur organisasi. serta pembagian wewenang dan tanggung jawab, proses untuk merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten, serta kejelasan terkait ukuran kinerja, insentif, dan imbalan untuk mendorong akuntabilitas kinerja. Lingkungan pengendalian yang dihasilkan akan berdampak luas terhadap sistem pengendalian intern secara keseluruhan.

2) Penentuan Risiko (*Risk Assessment*) Penentuan risiko mengimplikasikan proses yang dinamis dan berulang (iterative) untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko terkait pencapaiantujuan. COSO IC 2013 merumuskan definisi resiko yaitu sebagai kemungkinan buruk bagi pencapaian tujuan atas suatu peristiwa akan terjadi. Risiko yang dihadapi organisasi bisa bersifat internal (berasal dari dalam) ataupun eksternal (bersumber dari luar).

Risiko yang teridentifikasi akan disandingkan dengan tingkatan toleransi risiko yang sudah ditetapkan. Penilaian risiko menjadi langkah awal bagaimana risiko organisasi akan dikelola. Salah satu prasyarat untuk menilai risiko ialah penetapan tujuan dalam kategori operasi, pelaporan, dan kepatuhan dengan jelas sehingga risiko-risiko terkait bisa diidentifikasi dan dianalisis. Manajemen juga harus memperhitungkan apakah tujuan dan organisasi telah sesuai. Penilaian risiko menuntut manajemen untuk mengawasi dampak dari perubahan lingkungan eksternal serta perubahan model bisnis organisasi yang berpeluang mengakibatkan tidak berhasilnya pengendalian intern yang ada.

3) Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*) Kegiatan pengendalian melingkupi aktivitas-aktivitas yang diputuskan melalui kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan dilaksanakannya arahan manajemen dalam rangka menekan risiko atas pencapaian tujuan. Kegiatan pengendalian dilakukan pada semua tingkatan organisasi, pada berbagai tahap proses bisnis, dan pada konteks lingkungan teknologi. Kegiatan pengendalian dibagi menjadi dua, ada yang bersifat preventif (detektif) dan ada yang bersifat manual (otomatis). Contoh kegiatan pengendalian adalah otorisasi dan persetujuan, verifikasi, rekonsiliasi, dan review kinerja. Dalam menentukan dan mengembangkan kegiatan pengendalian akan melekat konsep pemisahan fungsi (*segregation of duties*). Jika pemisahan fungsi tersebut dianggap efisien maka manajemen harus menentukan dan mengembangkan pilihan alternatif kegiatan pengendalian sebagai gantinya.

4) Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*) Organisasi membutuhkan informasi demi terlaksananya fungsi pengendalian intern dalam mendukung pencapaian tujuan. Manajemen harus memperoleh, menghasilkan dan menggunakan informasi yang signifikan dan berkualitas baik dari sumber internal maupun eksternal. Hal tersebut sangat dibutuhkan agar elemen pengendalian intern yang lain berfungsi dengan baik sebagaimana harusnya. Disamping itu, komunikasi yang merupakan proses berulang (*iterative*) dan berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan dan menyediakan

informasi harus menjadi sarana penyebaran informasi di dalam organisasi, baik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, maupun lintas fungsi

Kegiatan Pemantauan (*Monitoring Activities*) Komponen ini merupakan satu-satunya komponen yang berubah nama. Sebelumnya komponen ini hanya disebut pemantauan (monitoring). Perubahan ini bertujuan untuk memperluas pengertian pemantauan sebagai deretan rangkaian aktivitas yang dilakukan sendiri dan juga sebagai bagian dari masing-masing empat komponen pengendalian intern lainnya. Kegiatan pemantauan meliputi evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau kombinasi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan masing-masing komponen pengendalian intern ada dan masing-masing berfungsi sebagaimana mestinya. Evaluasi berkelanjutan dibangun di dalam proses bisnis pada tingkat yang berbeda untuk menyajikan informasi dengan tepat waktu. Evaluasi terpisah dilakukan secara berkala, variasi lingkup dan frekuensinya tergantung pada hasil penilaian risiko, efektivitas evaluasi berkelanjutan, dan pertimbangan manajemen lainnya.

Menurut Arens, Elders, dan Beasley (2015:340) Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasaran manajemen. Beberapa komponen pengendalian intern yang dinyatakan *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission / COSO*, terbagi menjadi 5 komponen pengendalian:

Gambar 2. 2 kubus kubus ini menjelaskan dimensi-dimensi yang dijabarkan dalam Kerangka Kerja Pengendalian Internal COSO 2013. (Gambar: COSO 2013). Gambar 2. 2 Kubus Kubus ini menjelaskan dimensi-dimensi yang dijabarkan dalam kerangka kerja pengendalian internal COSO 2013.



Sumber : COSO 2013

1. Pengendalian lingkungan internal

Pengendalian lingkungan internal adalah menentukan bentuk organisasi, menciptakan efek awareness pada SDMnya. Pengendalian lingkungan internal adalah salah satu pondasi dari keseluruhan komponen internal control yang di dalamnya terdapat *discipline and structure*.

Komponen ini tersedia panduan-panduan untuk organisasi serta memberikan efek awareness bagi para anggota dalam organisasi. Integritas, nilai etik, kompetensi, komitmen, direksi, audit, dan human resources merupakan suatu faktor-faktor yang memberikan pengaruh (*influence*) pada pengendalian lingkungan intern.

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2015:346) ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian, diantaranya:

1. Integritas dan nilai etika

2. Komitmen terhadap kompetensi.
3. Partisipasi dewan direksi dan komisaris atau komite audit.
4. Filosofi dan gaya operasi manajemen. Manajemen, melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukannya memberikan sinyal yang sangat jelas kepada karyawan mengenai signifikansi pengendalian internal.
5. Struktur organisasi.
6. Kebijakan perihal sumber daya manusia.

2. Penilaian Risiko

Risk assesment ialah menganalisis atau mengidentifikasi atas risiko yang bernilai relevan dengan maksud untuk mencapai suatu goal (tujuan), metode untuk menetapkan tata cara mengelola risiko. Implementasi risk assessment dalam laporan keuangan ialah melakukan standarisasi dalam penganalisan, identifikasi, pengorganisasian, dan risk management terkait penciptaan laporan keuangan (*financial reporting*). *Risk management* yang berhubungan dengan laporan keuangan dimulai dari aktivitas pencatatan, aktivitas proses, aktifitas ikhtisar serta laporan data financial. Berdasarkan rumusan COSO, bahwa penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Risiko itu sendiridipahami sebagai suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan entitas, dan risiko terhadap pencapaian seluruh tujuan dari entitas ini dianggap relatif terhadap toleransi risiko yang ditetapkan.

3. Pengendalian aktivitas intern

Pengendalian aktivitas intern adalah suatu aktivitas yang memberikan arahan-arahan yang mendukung terjaminya pelaksanaan kegiatan intern perusahaan terlaksana dengan baik dan sesuai SOP. Pengendalian aktivitas intern merupakan suatu prosedur atau kebijakan yang dibuat untuk mengatasi risiko-

risiko sehingga mempermudah organisasi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Pengendalian aktivitas intern mempunyai tingkatan-tingkatan implementasi dalam penerapanditingkat fungsi maupun organisasi. Biasanya pengendalian aktivitas intern yang sekiranya memiliki relevansi atas audit bisa dijadikan kebijakan maupun sebagai prosedur terkait dengan peninjauan atas pemisahaan fungsi, kontrol fisik, olah data informasi, dan kinerja pengendalian. Berikut kategori-kategori pengendalian aktivitas intern:

1. Kontrol olah data informasi (pemrosesan).

- a. Application control
- b. Sistem otorisasi akurat
- c. Aktualisasi pencatatan dan dokumentasi
- d. Independensi pemeriksaan
- e. Pengendalian umum

2. Pemisahan Tugas

- a. Pengendalian Fisik
- b. Telah Kinerja

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2015:236) meyakini bahwa, “Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur selain yang telah dimasukkan dalam ke- empat komponen lainnya, yang membantu untuk meyakinkan bahwa tindakan-tindakan yang penting telah dilakukan untuk mengatasi risiko-risiko dalam mencapai tujuan organisasi.”.

4. Informasi Dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem informasi yang relevan dalam pelaporan keuangan yang

meliputi sistem akuntansi yang berisi metode mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisa, klasifikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi serta menjaga akuntabilitas aset dan kewajiban. Komunikasi meliputi penyediaan deskripsi tugas individu dan tanggung jawab berkaitan dengan struktur pengendalian intern dalam pelaporan keuangan. Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk memahami:

1. Golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi laporan keuangan.
2. Bagaimana transaksi tersebut dimulai.
3. Catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu dalam laporan keuangan yang tercakup dalam pengolahan dan pelaporan transaksi.
4. Pengolahan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai sampai digandimasukkan ke dalam laporan keuangan, termasuk alat elektronik yang digunakan untuk mengirim, memproses, memelihara, dan mengakses informasi

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepatwaktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Berdasarkan AICPA karakteristik sistem pengendalian internal yang baik adalah sebagai berikut:

1. Tujuan pengendalian akuntansi tergantung pada kompetensi dan integritas personal, independensi fungsi yang diberikan, dan pemahaman mereka tentang prosedur yang telah ditentukan.

2. Pemisahan fungsi yang cukup. Adanya pemisahan fungsi yang jelas atas fungsi yang berlainan untuk tujuan pengendalian internal. Pemisahaan fungsi tersebut adalah dengan menempatkan orang yang berbeda dalam suatu posisi.

3. Transaksi dibuat sesuai dengan bukti yang independen yang membutuhkan otorisasi, dimana otorisasi diberikan oleh orang yang berwenang dan transaksi sesuai dengan masa otorisasi.

4. Transaksi dicatat dalam jumlah dan periode akuntansi pada saat transaksi tersebut terjadi dan diklasifikasikan dalam akun yang tepat.

5. Perolehan aset harus dibatasi dengan otorisasi seseorang.

6. Aset yang ada harus dibandingkan dengan catatan akuntansinya.

Menurut Hery (2011:50) Mengendalian internal atas piutang usaha diawali dengan melakukan evaluasi atas kelayakan kredit debitur. Setiap penjualan kredit yang dilakukan oleh calon pembeli haruslah diuji atau dievaluasi terlebih dahulu kelayakan kreditnya. Bagian penjualan tidak boleh merangkap bagian kredit. Persetujuan pemberian kredit hanya boleh dilakukan oleh manajer kredit. Manajer penjualan tidaklah memiliki otorisasi atau wewenang untuk menyetujui proposal kredit pelanggan. Harus adanya pemisahan fungsi antara bagian persetujuan kredit, bagian penjualan, bagian pencatatan (akuntansi), dan bagian penagihan.

2.1.3. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Menurut santoso (2014, p 10-14) SOP terdiri dari 7 hal pokok yaitu efisiensi, konsisten, minimalisasi kesalahan, penyelesaian masalah, perlindungan tenaga kerja, peta kerja, dan batasan pertahanan.

a. Efisiensi

Efisiensi diartikan sebagai suatu ketepatan, efisiensi berupa hal hal yang berhubungan dengan kegiatan atau aktifitas yang diharapkan akan menjadi lebih tepat dan tidak hanya cepat saja, melainkan sesuai dengan tujuan dan target yang

diinginkan.

b. Konsistensi

Konsistensi dapat diartikan sebagai ketetapan atau hal hal yang tidak berubah maka dapat di kalkulasi dengan tepat. Keadaan yang konsisten akan memudahkan pengukuran untung \pm rugi, juga regulasi pemasaran oleh karena itu semua yang terlibat didalamnya sangat membutuhkan disiplin tinggi.

c. Minimalisasi kesalahan

Minimalisasi kesalahan yaitu dapat menjauhkan segala eror di segala area tenaga kerja. Standar operasional prosedur (SOP) menjadi panduan pasti yang membimbing tiap pegawai menjalankan aktivitas kerjanya secara sistematis.

d. Penyelesaian masalah Standar operasional prosedur (SOP) juga dapat menjadi penyelesaian masalah yang mungkin juga timbul dalam aktivitas perusahaan atau institusi. Terkadang konflik antar karyawan sering terjadi. Bahkan tidak ada penengah yang bisa memecahkan konflik yang dimaksud. Tetapi, apabila dikembalikan kedalam standar operasional prosedur (SOP) yang sebelumnya sudah disusun secara tepat, maka tentu saja kedua belah pihak harus tunduk pada standar operasional prosedur (SOP) tersebut.

e. Perlindungan tenaga kerja

Perlindungan tenaga kerja adalah langkah langkah pasti dimana memuat segala tata cara untuk melindungi tiap tiap sumber daya dari potensi pertanggung jawaban, dan berbagai persoalan personal. Standar operasional prosedur (SOP) dalam hal ini di maksud melindungi hal hal yang berkaitan dengan persoalan pegawai sebagai loyalitas perusahaan dan pegawai sebagai individu secara personal.

f. Peta kerja

Peta kerja sebagai pola pola dimana semua aktivitas yang sudah tertata rapi bisa dijalankan dalam pikiran masing masing sebagai suatu kebiasaan yang pasti. Dengan standar operasional prosedur (SOP), pola kerja menjadi lebih fokus dan tidak melebar kemana-mana, hal ini terkait dengan poin pertama yang

efisien, bahwa salah satu syaratnya adalah fokus terhadap peta yang akan dijalankan.

g. Batas pertahanan

Batasan pertahanan dipahami sebagai langkah defense dari segala inspeksi baik dari pemerintah ataupun pihak pihak relasi yang menginginkan kejelasan peta kerja perusahaan. standaroperasional prosedur (SOP) bisa diibaratkan sebagai benteng pertahanan yang kokoh karena secaraprosedural segala aktifitas institusi ataupun perusahaan sudah tertera dengan jelas. Oleh karena itu, inspeksi-inspeksi yang bersifat datang dari luar perusahaan tidak bisa menjadikan hal-hal yang sudah termuat dalam standar operasional prosedur (SOP) untuk merubah atau bahkan menggoyahkan perusahaan.

2.1.4. Piutang

1. Pengertian

Ada dua kategori penggolongan piutang menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.9), yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang terdiri atas tiga golongan yaitu piutang dagang (usaha), piutang bukan dagang, dan piutang penghasilan. Piutang dagang merupakan adanya janji lisan dari pembeli untuk membayar barang atau jasa yang dijual yang penagihannya tidak lebih dari satu periode akuntansi dan pada umumnya penjualan secara kredit biasanya dengansyarat pembayaran (2/10, n/30), seperti piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Sedangkan piutang di luar dagang merupakan adanya transaksi di luar dagang yang mengakibatkan timbulnya tagihan pada masa yang akan datang kepada konsumen, seperti: piutangdividen, piutang bunga, piutang sewa.

Piutang merupakan aktiva lancar atau kekayaan perusahaan yang timbul karena adapenjualan secara kredit. Cara penjualan kredit ini merupakan cara yang biasanya dilakukan dalam dunia bisnis untuk dapat menarik para pelanggan pembeli barang dan jasa dalam perusahaan. Piutang (*receivable*) adalah klaim

uang, barang, atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya. Untuk tujuan pelaporan keuangan, piutang diklasifikasikan sebagai lancar (jangka pendek) atau tidak lancar (jangka panjang). Piutang adalah merupakan kebiasaan bagi perusahaan bagi perusahaan untuk memberikan kelonggaran kepada para pelanggan pada waktu melakukan penjualan.

2. Alur Aktivitas Pemberian Piutang

Menurut Munawaroh untuk mencapai efektivitas kredit perbankan perlu menerapkan prosedur pemberian kredit yang efektif. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa prioritas kredit telat tepat sasaran. Prosedur pemberian kredit tersebut adalah sebagai berikut :

a. Permohonan kredit

Permohonan kredit (*credit application*) yaitu formulir permohonan kredit yang harus diisi oleh pemohon kredit, memuat beberapa catatan informasi tentang pemohon, antara lain meliputi identitas pemohon, keterangan domisili, pekerjaan atau jenis usaha, pendapatan, jumlah pinjaman yang telah dimiliki, serta harta yang dimiliki dan dapat dijadikan agunan.

b. Analisis kredit

Analisis kredit adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permohonan kredit. Tujuan utama analisis kelayakan kredit adalah untuk mendapatkan kepercayaan apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak pemberi kredit secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunganya, sesuai kesepakatan dengan pihak kreditur.

Analisis kredit juga bertujuan agar kredit yang diberikan mencapai sasaran, yaitu aman dan terarah. Aman dengan pengertian kredit tersebut harus diterima kembali pengembaliannya secara tertib, teratur dan tepat waktu, sesuai perjanjian antara pihak kreditur dan nasabah. Sedangkan terarah, artinya kredit yang diberikan tersebut digunakan untuk tujuan seperti yang dimaksud dalam

permohonan kredit dan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan ketika diisyaratkan dalam akad kredit.

c. Keputusan kredit

Keputusan kredit adalah menentukan apakah pemohon kredit diterima atau tidak diterima, apabila diterima langsung menyerahkan administrasinya. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya adalah calon nasabah menandatangani akad kredit, atau surat perjanjian yang harus diisi sebelum kredit dicairkan.

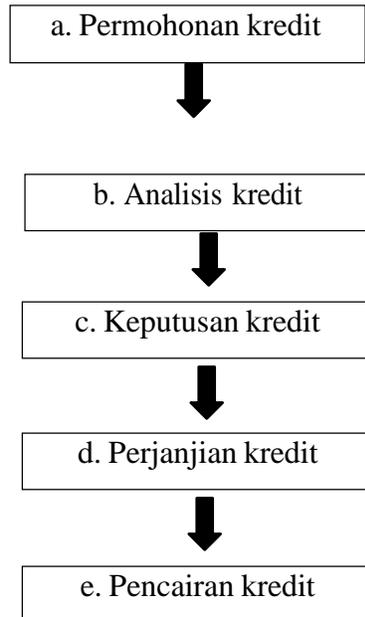
d. Perjanjian kredit

Perjanjian kredit adalah ikatan atau hubungan hukum antara debitur (berhutang) dan kreditur (pemberi hutang) yang isi mengatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak, perjanjian ini biasanya diikuti dengan perjanjian “jaminan penanggungan” (perorangan).

e. Pencairan kredit

Pencairan kredit adalah setiap transaksi yang menggunakan kredit yang telah disetujui oleh koperasi. Dalam prakteknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran atau pemindah bukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya

Gambar 2. 3. Flowchart Aktivitas Pemberian Piutang



Sumber : Data diolah peneliti

3. Penggolongan Piutang

Pada koperasi terdapat begitu banyak jenis piutang yang dimiliki. Menurut Rudianto piutang dalam koperasi dapat digolongkan menjadi 3 kelompok berdasarkan jenis dan asalnya yaitu:

a. Piutang Anggota Piutang

anggota adalah piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan koperasi kepada anggota koperasi. Pada kegiatan normal koperasi, piutang anggota biasanya akan dilunasi dalam tempo kurang dari satu tahun, sehingga piutang anggota dikelompokkan ke dalam kelompok b. Piutang Bukan Anggota Piutang bukan anggota adalah piutang yang timbul akibat koperasi melakukan transaksi kredit kepada bukan anggota koperasi. Piutang ini mencakup piutang usaha dan piutang bukan usaha. Piutang usaha adalah piutang yang timbul dari transaksi penjualan produk koperasi. Sementara piutang bukan usaha adalah piutang yang timbul bukan dari aktivitas usaha koperasi, termasuk dalam kelompok berikut: okkan ke dalam aktiva lancar.

Piutang bukan anggota adalah piutang yang timbul akibat koperasi melakukan transaksi kredit kepada bukan anggota koperasi. Piutang ini mencakup piutang usaha dan piutang bukan usaha. Piutang usaha adalah piutang yang timbul dari transaksi penjualan produk koperasi. Sementara piutang bukan usaha adalah piutang yang timbul bukan dari aktivitas usaha koperasi, termasuk dalam kelompok berikut:

- 1) Persekot dalam kontrak pembelian
 - 2) Klaim terhadap perusahaan angkutan atas barang yang rusak atau hilang
 - 3) Klaim terhadap perusahaan asuransi atas kerugian yang dipertanggung jawabkan
 - 4) Klaim terhadap karyawan koperasi
 - 5) Klaim terhadap restitusi pajak
 - 6) Piutang dagang
- b. Piutang Karyawan

Piutang karyawan adalah tagihan koperasi kepada karyawan koperasi. Pembayaran piutang karyawan biasanya dilakukan melalui pemotongan gaji pada bulan berikutnya.

4. Unsur-Unsur Piutang

Menurut Kasmir unsur-unsur yang terdapat pada transaksi kredit adalah :

a. Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberi piutang bahwa piutang yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian menyelidikantentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyidikan kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah permohonan piutang.

b. Kesepakatan

Selain unsur kepercayaan dalam piutang juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi piutang dengan penerima piutang. Kesepakatan ini dituangkan dalam satu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

c. Jangka Waktu

Setiap piutang yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian piutang yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

d. Risiko

Risiko akan terjadi akibat adanya kesenjangan waktu dari pemberian piutang. Asumsinya adalah semakin lama waktu pemberian piutang maka semakin tinggi pula tingkat risikonya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai maupun risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e. Balas Jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian piutang atau jasa yang sering dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi piutang ini merupakan keuntungan bank.

5. Tujuan Piutang

Tujuan dari pemberian piutang adalah sebagai berikut :

a. Mencari keuntungan Mencari keuntungan bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian piutang. Hasil pemberian piutang berupa bunga sebagai balas jasa atas pinjaman dan biaya administrasi piutang yang dibebankan kepada penerima piutang.

b. Membantu usaha nasabah atau penerima piutang Membantu usaha nasabah

dengan cara membiayai usaha anggotanya yang bertujuan untuk dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu pemerintah Bagi pemerintah semakin banyak piutang yang disalurkan oleh pihak lembaga keuangan maka akan semakin baik, mengingat semakin banyak piutang berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan keputusan pembelian relatif banyak dilakukan. Namun demikian penelitian tersebut memiliki variasi yang berbeda seperti penggunaan variabel independen, lokasi penelitian, jumlah responden yang berbeda dan lain sebagainya.

Eko Suyono (2011) Dalam skripsinya yang berjudul “Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pada Koperasi Unit Desa “X” di Kabupaten Banyumas”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa komponen- komponen pengendalian intern yang sesuai dengan kerangka kerja COSO 2013 yang meliputi lingkungan pengendalian, risiko pengendalian, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan monitoring ada dan sudah berjalan efektif pada KUD “x”. Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel pengendalian internal. Perbedaannya ada pada lokasi dan waktu penelitian, penelitian Eko pada KUD di Kecamatan Banyumas sedangkan penelitian sekarang pada USP Tani Wilis di Sendang.

Novi Khoiriawati dan Zuni Barokah (2019) Dalam jurnalnya yang berjudul “Evaluasi Penerapan Pengendalian Internal Atas Piutang (Studi Pada PT X)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pengendalian internal atas piutang di PT X telah dilaksanakan dengan skor sebesar 71,21% dan terdapat beberapa hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terdapat pada lokasi dan waktu penelitian, penelitian ini dilakukan pada PT X tahun 2019

sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada Unit Simpan Pinjam KUD Tani Wilis Sendang.

Anisa Dian (2017) Dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pada Koperasi Serba Usaha Citra Politeknik Negeri Malang”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pada KSU Citra Polinema sudah memenuhi kriteria dari komponen kerangka kerja-ERM yang dikembangkan oleh COSO. Hanya saja masih perlu membenahi di komponen penetapan wewenang dan tanggung jawab, prosedur pengamanan asset, catatan dan dokumen, serta penggunaan sistem komputerisasi berbasis program. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang ada pada variabel penerapan pengendalian internal. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, penelitian ini pada KSU sedangkan penelitian sekarang pada USP.

Riska S. Papalangi (2013) Dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit UKM pada PT. BRI Tbk Manado”. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pemberian kredit pada UKM yang dilakukan oleh PT. BRI Tbk Cabang Manado sudah baik karena sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam proses pemberian kredit telah memenuhi unsur-unsur pengendalian internal.

Bagus Nugroho Susanto (2016) Dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Piutang dan Akuntansi Penjualan Kredit Terhadap Efektivitas Penagihan Piutang Pada PT. Usaha Lantang Sejahtera Jakarta”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan sistem pengendalian internal piutang dan akuntansi penjualan kredit berpengaruh terhadap efektivitas penagihan piutang. Persamaannya dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan variabel pengendalian internal piutang. Perbedaan penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif

dengan tambahan variabel akuntansi penjualan kredit dan efektivitas penagihan piutang, penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif.

Abdul Latif dan Yuningsih (2017) Dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Piutang Pada Amanah Finance Cabang Gorontalo”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern piutang berperan dalam meningkatkan pengelolaan piutang. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel pengendalian intern piutang. Perbedaan penelitian sebelumnya pada amanah finance cabang Gorontalo sedangkan penelitian sekarang pada koperasi simpan pinjam Tani Wilis Sendang

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

PENELITIAN	JUDUL	VARIABEL	ANALISIS	HASIL
Eko Suyono (2011)	Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pada Koperasi Unit Desa “X” di Kabupaten Banyumas	pengendalian internal	Analisis Regresi Linier Sederhana	komponen-komponen pengendalian intern yang sesuai dengan kerangka kerja COSO 2013 yang meliputi lingkungan pengendalian, risiko pengendalian, aktivitas
				pengendalian, informasi dan komunikasi, dan monitoring ada dan sudah berjalan efektif pada KUD “x”.
Novi Khoiriawati dan Zuni Barokah (2019)	Evaluasi Penerapan Pengendalian Internal Atas Piutang (Studi Pada PT X)	Penerapan Pengendalian Internal Atas Piutang	Analisis Regresi Linier Sederhana	pengendalian internal atas piutang di PT X telah dilaksanakan dengan skor sebesar 71,21% dan terdapat beberapa hal-hal yang masih perlu diperbaiki.
Anisa Dian (2017)	Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pada Koperasi Serba Usaha Citra Politeknik Negeri Malang	penerapan pengendalian internal	Analisis Regresi Linier Sederhana	penerapan sistem pengendalian internal pada KSU Citra Polinema sudah memenuhi kriteria dari komponen kerangka kerja-ERM yang dikembangkan oleh COSO
Riska S. Papalangi (2013)	Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit UKM pada PT. BRI Tbk Manado	penerapan pengendalian internal	Analisis Regresi Linier Sederhana	sistem pemberian kredit pada UKM yang dilakukan oleh PT. BRI Tbk Cabang Manado sudah baik karena sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

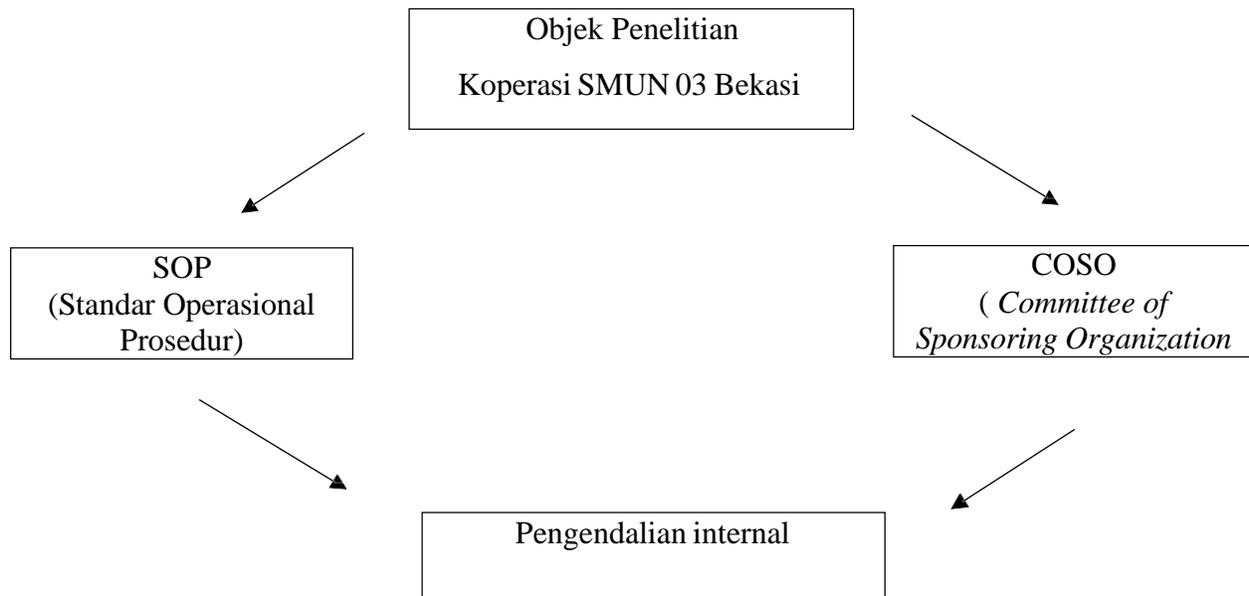
Bagus Nugroho Susanto (2016)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Piutang dan Akuntansi Penjualan Kredit Terhadap Efektivitas Penagihan Piutang Pada PT. Usaha Lantang Sejahtera Jakarta	pengendalian internal piutang	Analisis Regresi Linier Sederhana	secara parsial dan simultan sistem pengendalian internal piutang dan akuntansi penjualan kredit berpengaruh terhadap efektivitas penagihan piutang.
Abdul Latif dan Yuningsih (2017)	Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Piutang Pada Amanah Finance Cabang Gorontalo	pengendalian internal piutang	Analisis Regresi Linier Sederhana	sistem pengendalian intern piutang berperan dalam meningkatkan pengelolaan piutang.

Sumber : Data Diolah Peneliti

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sekaran dalam Sugiyono, 2011:60). Penelitian ini menganalisis tentang komponen-komponen pengendalian internal model COSO terdiri dari 5 komponen yaitu : Lingkungan pengendalian, Perhitungan Risiko, Informasi dan komunikasi, Aktivitas pengendalian, Pemantauan. Serangkaian prosedur tata kerja yang harus dipatuhi oleh setiap perangkat kerja agar pekerjaan menjadi terarah yang bertujuan untuk memperoleh hasil pekerjaan yang efisien dan efektif. SOP terdiri dari 7 hal pokok yaitu efisiensi, konsisten, minimalisasi kesalahan, penyelesaian masalah, perlindungan tenaga kerja, peta kerja, dan batasan pertahanan. Implementasi dan Efektivitas penelitian ini adalah penerapan sistem pengendalian internal terhadap piutang pada koperasi SMUN 03 Bekasi dan pengendalian internal terhadap koperasi SMUN 03 Bekasi sudah efektif. Adapun kerangka pemikir di atas dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut.

Gambar 2. 4. Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber : Data diolah peneliti (2023)